

**ANALISIS ALOKASI BELANJA PUBLIK DAN BELANJA OPERASIONAL  
TERHADAP REALISASI BELANJA DAERAH  
PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA KUPANG**

**Heriyanto Noman<sup>1)</sup>, Herni Sunarya<sup>2)</sup>, Fauziyah Lamaya<sup>2)</sup>**

*<sup>1)</sup>Alumni Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Kupang*

*<sup>2)</sup>Dosen Tetap Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Kupang*

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Alokasi Belanja Publik dan belanja operasional terhadap realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kota Kupang. Teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif dengan rumus sebagai berikut: Analisis Alokasi Belanja Publik (ABP) terhadap Belanja Daerah =  $\frac{\text{Belanja Publik}}{\text{Belanja Daerah}} \times 100\%$  dan Analisis Alokasi Belanja Operasional (ABO) terhadap Belanja Daerah =  $\frac{\text{Belanja Operasional}}{\text{Belanja Daerah}} \times 100\%$ . Hasil penelitian menunjukkan bahwa fokus pemerintah untuk melakukan pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota kupang belum terlaksana secara maksimal dan terkesan belum berpihak pada masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan alokasi dana belanja daerah yang masih memprioritaskan belanja aparatur jika dibandingkan dengan alokasi dana untuk belanja Publik dengan selisih alokasi belanja sebesar 87.21%.

***Kata kunci: Belanja Publik dan Belanja Operasional***

**PENDAHULUAN**

Keberadaan undang-undang nomor 22 tahun 1999 sebagai pengganti undang-undang nomor 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa merupakan suatu anugerah yang tak terhingga bagi pemerintahan daerah. karena dengan keberadaan undang-undang tersebut, pemerintah daerah mempunyai kewenangan penuh untuk mengatur pemerintahannya secara mandiri. Sejalan dengan tujuan otonomi daerah yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada daerah untuk menggali potensi daerah yang dimilikinya sehingga dapat meningkatkan penerimaan daerah untuk memperkuat kemandirian daerah. Selanjutnya hal penting yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah adalah tidak saja berfokus pada penggalian potensi daerah akan tetapi yang lebih penting juga adalah proporsi belanja daerah. Proporsi belanja daerah semestinya lebih diprioritaskan pada belanja publik atau belanja modal dari pada belanja aparatur atau belanja operasional.

Penelitian ini akan menfokuskan pada proporsi alokasi belanja publik dan belanja operasional dengan berbagai argumentasi penetapan anggaran, sehingga dapat diketahui arah dan kebijakan pembangunan yang sedang dijalankan dengan dukungan alokasi dana yang tepat dan transparan. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan masalah, yaitu Bagaimana Alokasi Belanja Publik terhadap realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kota Kupang? dan

Bagaimana Alokasi Belanja Operasional terhadap realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kota Kupang?

## TINJAUAN PUSTAKA

### *Belanja Publik, Belanja Operasional dan Belanja Daerah*

Mahmudi (2006:63) menjelaskan bahwa belanja publik merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah *asset* atau kekayaan daerah yang selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti Biaya Operasi dan Pemeliharaan. Belanja Publik memiliki karakteristik yang spesifik dari berbagai pertimbangan dalam pengalokasiannya. Pemerolehan aset tetap juga memiliki konsekuensi pada beban operasional dan pemeliharaan di masa yang akan datang (Bati, 2009).

Keberadaan anggaran belanja modal yang bersumber dari bantuan pusat dan pendapatan asli daerah, mempunyai nilai yang relatif kecil apabila dibandingkan dengan investasi swasta, namun belanja modal tersebut mempunyai peranan strategis pada dalam membiayai pembangunan dibidang sarana dan prasana yang dapat menunjang kelancaran usaha swasta dan pemenuhan pelayanan masyarakat. Mulyanto (2007) menjelaskan bahwa belanja modal merupakan belanja daerah yang dilakukan pemerintah daerah, diantaranya pembangunan dan perbaikan sektor pendidikan, kesehatan, transportasi sehingga masyarakat juga menikmati manfaat dari pembangunan daerah. Tersedianya struktur yang baik diharapkan dapat menciptakan efisiensi dan efektivitas di berbagai sektor, produktivitas masyarakat diharapkan menjadi semakin tinggi dan pada gilirannya akan terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Syaiful (2006:45) mengemukakan bahwa belanja publik dapat dikategorikan menjadi 5 (lima) kategori utama, yaitu Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Belanja Modal Fisik Lainnya.

Mahmudi (2006:12) menerangkan bahwa belanja operasional adalah penurunan dalam manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus keluar, atau deplesi aset atau terjadinya utang yang mengakibatkan berkurangnya ekuitas dana, selain yang berkaitan dengan distribusi kepada para peserta ekuitas dana guna kelancaran operasional. Bastian (2002:53) menambahkan bahwa belanja/biaya diklasifikasikan menurut penggunaan belanja/biaya yang dirinci berdasarkan kelompok dan jenis belanja/biaya, dan pusat pertanggungjawaban dirinci berdasarkan bagian atau fungsi dan unit organisasi pemerintah daerah.

Undang-undang no 33 tahun 2004 menyebutkan bahwa Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri atas urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintahdaerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Halim (2002:73) mengemukakan bahwa belanja daerah merupakan penurunan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau depleksi *asset*, atau terjadinya utang yang mengakibatkan berkurangnya ekuitas dana, selain yang berkaitan dengan distribusi kepada para peserta ekuitas dana.

### ***Kerangka Berpikir dan Hipotesis***

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti melakukan penelitian ini untuk mengetahui alokasi belanja modal dan belanja operasional terhadap belanja daerah yang selanjutnya diberikan pendapat yang dapat bermanfaat bagi pemerintah daerah dalam melakukan alokasi dana untuk pembangunan daerahnya. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam gambar 1 berikut ini:



Skema Kerangka Berpikir (Sumber: olahan Penulis)

Berdasarkan kerangka berpikir diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1 = Proporsi Belanja Publik lebih besar dalam realisasi belanja daerah tahun 2011-2015

H2 = Proporsi Belanja Operasional lebih besar dalam realisasi belanja daerah tahun 2011-2015

## **METODE PENELITIAN**

### ***Rancangan Penelitian***

Penelitian dengan judul Analisis Alokasi Belanja Publik dan Belanja Operasioanl Terhadap Realisasi Belanja Daerah pada pemerintah Kota Kupang. Obyek yang diteliti dalam penelitian ini adalah alokasi belanja publik, belanja operasional dan realisasi belanja daerah yang selanjutnya dijadikan sebagai variabel penelitian. jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif yang meliputi belanja Publik, belanja operasional dan realisasi belanja daerah. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang berupa struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah, laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2011-2015. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen yang berupa Laporan Realisasi

Anggaran dan laporan ekuitas serta catatan atas laporan keuangan tahun 2011 s/d 2015 dan melalui wawancara dengan pihak yang terkait.

#### ***Teknik Analisis Data***

Untuk analisis data, penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

- a) Analisis Alokasi Belanja Publik (ABP) Terhadap Belanja Daerah, menggunakan formulasi, sebagai berikut:

$$ABP = \frac{\text{Belanja publik}}{\text{Belanja Daerah}} \times 100\%$$

- b) Analisis Alokasi Belanja Operasional (ABO) terhadap Belanja Daerah, menggunakan formulasi, sebagai berikut:

$$ABP = \frac{\text{Belanja Operasional}}{\text{Belanja Daerah}} \times 100\%$$

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Untuk menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasional daerah dan belanja pelayanan publik secara optimal, maka diperlukan adanya analisis keserasian belanja antara belanja operasional dengan belanja publik. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja operasional atau belanja aparatur daerah berarti persentase belanja pelayanan publik yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Untuk mengetahui keserasian belanja aparatur/belanja operasional dengan belanja publik maka dapat dilakukan analisis berikut ini:

#### ***Analisis Belanja Publik terhadap Belanja daerah Pemerintah kota Kupang***

Belanja publik atau belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang meliputi belanja tanah, belanja gedung, belanja jalan dan jembatan, belanja irigasi, belanja listrik dan air serta semu belanja yang bersifat investasi jangka panjang. Semakin tinggi belanja publik menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat semakin baik karena belanja public dapat dimanfaatkan oleh semua masyarakat. Untuk mengetahui rasio belanja publik atau belanja modal, maka dapat dilakukan perhitungan seperti pada tabel 1 berikut ini: (*lih.lampiran 1*)

Berdasarkan tabel 1, dapat dilihat bahwa belanja publik atau belanja modal daerah untuk tahun 2011 sebesar 16.58%, tahun 2012 sebesar 11.47%, tahun 2013 sebesar 15.67%, dan untuk tahun 2014 sebesar 15.28%. Alokasi belanja public ini dapat dilihat dalam grafik 1 berikut ini: (*lih. lampiran 2*)

Dari tampilan grafik 1, dapat dilihat bahwa alokasi belanja public untuk tahun 2012 sebesar 11,47%, mengalami penurunan dari tahun 2011 sebesar 16,58% dengan angka

prosentase penurunan sebesar 5,11% (16,58%-11,47%), sedangkan tahun 2013 mengalami peningkatan menjadi 15,67% atau presentase peningkatan sebesar 4,2% dan pada tahun 2014 mengalami sedikit penurunan, yakni 0,39%.

Belanja public meliputi belanja tanah, belanja peralatan, belanja gedung, belanja jalan dan jaringan serta belanja lain-lain. Rincian belanja selama empat tahun terakhir untuk masing-masing komponen modal dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Belanja Tanah

Pemerintah Kota Kupang mengalokasikan dana untuk belanja tanah selama empat tahun dapat dilihat dalam tabel 2 berikut ini: (*lih. lampiran 1*)

Berdasarkan tabel 2 tersebut, dapat dilihat bahwa belanja tanah untuk tahun 2011 sebesar 1.01%, tahun 2012 sebesar 10.78%, tahun 2013 sebesar 6.24% dan tahun 2014 sebesar 5.41%. Dengan demikian, rata-rata pembelian tanah selama empat tahun terakhir sebesar 5.86%. Alokasi belanja tanah oleh pemerintah kota Kupang selama empat tahun dapat dilihat dalam grafik 2 berikut ini: (*lih. lampiran 2*)

Dari tampilan grafik 2 tersebut, dapat dilihat bahwa alokasi dana untuk belanja tanah tahun 2012 sebesar 10,78% mengalami peningkatan sebesar 1,01% dari tahun 2011 dengan prosentase kenaikan sebesar 9,77% (10,78 %-1,01%), sedangkan pada tahun 2013 mengalami penurunan menjadi 6,24% atau presentase penurunan sebesar 4,54% dan tahun 2014 mengalami sedikit penurunan yakni 0,83%.

b. Belanja Peralatan

Pemerintah Kota Kupang mengalokasikan dana untuk belanja peralatan selama empat tahun dapat dilihat dalam tabel 3 berikut ini: (*lih.lampiran 1*)

Berdasarkan tabel 3 tersebut, dapat dilihat bahwa belanja peralatan untuk tahun 2011 sebesar 21.41%, tahun 2012 sebesar 21.45%, tahun 2013 sebesar 27.93% dan tahun 2014 sebesar 28.24%. Dengan demikian rata-rata pembelian peralatan selama empat tahun terakhir sebesar 24.76%. Alokasi belanja peralatan oleh pemerintah kota Kupang selama empat tahun dapat dilihat dalam grafik 3 berikut ini: (*lih.lampiran 2*)

Dari tampilan grafik 3 dapat dilihat dengan jelas bahwa alokasi dana untuk belanja peralatan tahun 2012 sebesar 21,45% mengalami peningkatan dari tahun 2011 sebesar 21,41% dengan angka prosentase kenaikan sebesar 0,04 (21,45 %-21,41%), sedangkan pada tahun 2013 mengalami peningkatan menjadi 27,93% atau presentase peningkatan sebesar 6,04% dan tahun 2014 mengalami sedikit peningkatan yakni sebesar 0,31%.

c. Belanja Bangunan/gedung

Pemerintah Kota Kupang mengalokasikan dana untuk belanja gedung selama empat tahun dapat dilihat dalam tabel 4 berikut ini: (*lih.lampiran 1*)

Berdasarkan tabel 4 tersebut, dapat dilihat bahwa belanja gedung untuk tahun 2011 sebesar 24.26%, tahun 2012 sebesar 25.69%, tahun 2013 sebesar 27.77% dan tahun 2014 sebesar 26.33%. Dengan demikian rata-rata pembelian gedung selama empat tahun terakhir sebesar 26.01%. Alokasi belanja gedung oleh pemerintah kota Kupang selama empat tahun dapat dilihat dalam grafik 4 berikut ini: (*lih.lampiran 2*)

Dari tampilan grafik 4 tersebut, dapat dilihat dengan jelas bahwa alokasi dana untuk belanja gedung tahun 2012 sebesar 25,69% mengalami peningkatan dari tahun 2011 sebesar 24,26% dengan angka prosentase kenaikan sebesar 1,43 (26,69%-24,26%), sedangkan pada tahun 2013 mengalami peningkatan menjadi 27,77% atau presentase peningkatan sebesar 1,08% dan tahun 2014 mengalami sedikit penurunan yakni sebesar 1,44%.

d. Belanja Jalan dan jaringan

Pemerintah Kota Kupang mengalokasikan dana untuk belanja jalan dan jaringan selama empat tahun dapat dilihat dalam tabel 5 berikut ini: (*lih.lampiran 1*)

Berdasarkan tabel 5 tersebut, dapat dilihat bahwa belanja gedung untuk tahun 2011 sebesar 24.26%, tahun 2012 sebesar 25.69%, tahun 2013 sebesar 27.77% dan tahun 2014 sebesar 26.33%. Dengan demikian rata-rata pembelian jalan dan jaringan selama empat tahun terakhir sebesar 26.01%. Alokasi belanja jalan dan jaringan oleh pemerintah kota Kupang selama empat tahun dapat dilihat dalam grafik 5 berikut ini: (*lih.lampiran 2*)

Dari tampilan grafik 5 tersebut, dapat dilihat dengan jelas bahwa alokasi dana untuk belanja jalan dan jaringan tahun 2012 sebesar 40,42% mengalami penurunan dari tahun 2011 sebesar 49,46% dengan angka prosentase penurunan sebesar 9,04% (49,46%-40,42%), sedangkan tahun 2013 mengalami penurunan menjadi 34,50% atau presentase penurunan sebesar 5,92% dan untuk tahun 2014 mengalami sedikit penurunan, yakni sebesar 0,35%.

e. Belanja Aset Tetap Lainnya

Pemerintah Kota Kupang mengalokasikan dana untuk belanja aset tetap lain selama empat tahun dapat dilihat dalam tabel 6 berikut ini: (*lih.lampiran 1*)

Berdasarkan tabel 6 tersebut, dapat dilihat bahwa belanja Aset Tetap Lainnya untuk tahun 2011 sebesar 24.26%, tahun 2012 sebesar 25.69%, tahun 2013 sebesar 27.77% dan tahun 2014 sebesar 26.33%. Dengan demikian rata-rata pembelian Aset Tetap Lainnya selama empat tahun terakhir sebesar 26.01%. Alokasi belanja Aset Tetap Lainnya oleh pemerintah kota Kupang selama empat tahun dapat dilihat dalam grafik 6 berikut ini: (*lih.lampiran 2*)

Dari tampilan grafik 6 tersebut, dapat dilihat dengan jelas bahwa alokasi dana untuk belanja aset tetap lainnya tahun 2012 sebesar 1,65% mengalami penurunan dari tahun 2011 sebesar 3,87% dengan angka prosentase penurunan sebesar 2,22% (3,87%-1,65%),

sedangkan pada tahun 2013 mengalami peningkatan menjadi menjadi 3,57% atau presentase penurunan sebesar 1,92% dan untuk tahun 2014 mengalami peningkatan menjadi 2,3%.

#### ***Analisis Belanja Operasional terhadap Belanja daerah Pemerintah kota Kupang***

Belanja aparatur / belanja operasional yang dilakukan oleh pemerintah kota Kupang adalah belanja pegawai, belanja subsidi, belanja bunga, belanja hiba, belanja social, Belanja Bantuan Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga. Untuk mengetahui rasio belanja aparatur dapat dilihat dalam tabel 7 berikut ini: (*lih.lampiran 1*)

Berdasarkan tabel 7 tersebut dapat dilihat bahwa belanja operasional atau belanja rutin daerah untuk tahun 2011 sebesar 83.42% , tahun 2012 sebesar 88.53%, tahun 2013 sebesar 84.33%, dan tahun 2014 sebesar 84.72%. Alokasi operasional atau belanja rutin ini dapat dilihat dalam grafik 7 berikut ini: (*lih.lampiran 2*)

Dari tampilan grafik 7 tersebut, dapat dilihat dengan jelas bahwa alokasi belanja operasional tahun 2012 sebesar 88,53% mengalami peningkatan dari tahun 2011 sebesar 83,42% dengan angka prosentase peningkatan sebesar 5,11% (88,53%-83,42%), sedangkan pada tahun 2013 mengalami penurunan menjadi menjadi 84,33% atau presentase penurunan sebesar 4,2% dan tahun 2014 mengalami peningkatan menjadi 84,72% atau prosentase peningkatan mencapai 0,39%.

Rincian belanja selama empat tahun terakhir untuk masing-masing komponen belanja rutin dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### **a. Belanja Pegawai**

Pemerintah Kota Kupang mengalokasikan dana untuk belanja pegawai selama empat tahun dapat dilihat dalam tabel 8 berikut ini: (*lih.lampiran 1*)

berdasarkan table 8 tersebut, dapat dilihat bahwa belanja pegawai daerah untuk tahun 2011 sebesar 78.14%, tahun 2012 sebesar 77.67% , tahun 2013 sebesar 76.12% , tahun 2014 sebesar 75.93%. Alokasi belanja pegawai ini dapat dilihat dalam grafik 8 berikut ini: (*lih.lampiran 2*)

Dari tampilan grafik 8 tersebut, dapat dilihat dengan jelas bahwa alokasi dana untuk belanja pegawai tahun 2012 sebesar 77,67% mengalami penurunan dari tahun 2011 sebesar 78,14% dengan angka prosentase penurunan sebesar 0,54% (78,14%-77,67%), sedangkan tahun 2013 mengalami penurunan menjadi menjadi 76,12% atau presentase penurunan sebesar 1,55% dan tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 75,93% atau prosentase peningkatan mencapai 0,19%.

##### **b. Belanja Barang dan Jasa**

Pemerintah Kota Kupang mengalokasikan dana untuk belanja Barang dan Jasa selama empat tahun dapat dilihat dalam tabel 9 berikut ini: (*lih.lampiran 1*)

Berdasarkan tabel 9 tersebut, dapat dilihat bahwa belanja Barang dan Jasa daerah untuk tahun 2011 sebesar 17.25%, tahun 2012 sebesar 16.50%, tahun 2013 sebesar 19.43%, tahun 2014 sebesar 21.97%. Alokasi belanja Barang dan Jasa ini dapat dilihat dalam grafik 9 berikut ini: (*lih.lampiran 2*)

Dari tampilan grafik 9 tersebut, dapat dilihat dengan jelas bahwa alokasi dana untuk belanja barang dan jasa tahun 2012 sebesar 16.50% mengalami penurunan dari tahun 2011 sebesar 17,25% dengan angka prosentase penurunan sebesar 0,75% (17.25%-16.50%), sedangkan pada tahun 2013 mengalami peningkatan menjadi menjadi 19,43% atau presentase penurunan sebesar 2.93% dan tahun 2014 mengalami peningkatan dengan prosentase peningkatan mencapai 2,54%.

c. Belanja Hibah

Pemerintah Kota Kupang mengalokasikan dana untuk belanja hibah selama empat tahun dapat dilihat dalam table 10 berikut ini: (*lih.lampiran 1*)

Berdasarkan table 10 tersebut, dapat dilihat bahwa belanja hibah untuk tahun 2011 sebesar 2.28%, tahun 2012 sebesar 4.85%, tahun 2013 sebesar 2.87%, dan tahun 2014 sebesar 0.78%. Alokasi belanja hibah ini dapat dilihat dalam grafik 10 berikut ini: (*lih.lampiran 2*)

Dari tampilan grafik 10 tersebut, dapat dilihat dengan jelas bahwa alokasi dana untuk belanja hibah tahun 2012 sebesar 4,85% mengalami peningkatan dari tahun 2011 sebesar 2,28% dengan angka prosentase penurunan sebesar 2,57% (4.85%-2.28%), sedangkan pada tahun 2013 mengalami penurunan menjadi menjadi 2.87% atau presentase penurunan sebesar 1,89% dan untuk tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 0.78% atau prosentase penurunan mencapai 2,89%

d. Belanja Bantuan Sosial

Pemerintah Kota Kupang mengalokasikan dana untuk belanja Bantuan Sosial selama empat tahun dapat dilihat dalam tabel 11 berikut ini: (*lih.lampiran 1*)

berdasarkan tabel 10 tersebut, dapat dilihat bahwa belanja Bantuan Sosial untuk tahun 2011 sebesar 2.28%, tahun 2012 sebesar 4.85%, tahun 2013 sebesar 2.87%, tahun 2014 sebesar 0.78%. Alokasi belanja Bantuan Sosial ini dapat dilihat dalam grafik11 berikut ini: (*lih.lampiran 2*)

Dari tampilan grafik 11 tersebut, dapat dilihat dengan jelas bahwa alokasi dana untuk belanja bantuan sosial tahun 2012 sebesar 0,99% mengalami penurunan dari tahun 2011 sebesar 2.33% dengan angka prosentase penurunan sebesar 1.34% (2.33%-0,99%), sedangkan tahun 2013 mengalami penurunan menjadi menjadi 0.98% atau presentase penurunan sebesar 0.01% dan anggaran belanja bantuan sosial yang dialokasikan untuk

tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 0.81% atau prosentase peningkatan mencapai 0,17%.

### *Analisis perbandingan Belanja Publik dengan Belanja Operasional*

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dalam merencanakan alokasi belanja pada APBD agar lebih mengutamakan keberpihakan untuk kepentingan publik (belanja langsung) daripada kepentingan aparatur (belanja tidak langsung). Dalam mengalokasikan komponen Belanja Langsung yang berupa Belanja Modal harus memperhatikan beberapa hal, yaitu mengarahkan Belanja Modal untuk pembangunan infrastruktur yang menunjang investasi di daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah, melakukan evaluasi dan pengkajian terhadap barang-barang inventaris yang tersedia baik dari sisi kondisi maupun umur ekonomisnya sehingga pengadaan barang inventaris dapat dilakukan secara selektif sesuai kebutuhan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah. Kemudian menyusun Belanja Modal sebesar harga beli/bangun aset tetap ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset tetap tersebut sampai siap digunakan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut terlihat hubungan antara tiga cara mengukur efektivitas anggaran pembangunan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, yaitu :

1. Dengan melihat seberapa besar pemerintah menentukan alokasi nilai belanja untuk kepentingan publik ternyata masih rendah efektivitasnya;
2. Dengan melihat seberapa besar nilai belanja untuk kepentingan publik tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik dengan optimal juga masih rendah efektivitasnya. Hal ini didasarkan rendahnya kemampuan pemerintah dalam mengalokasikan anggaran belanja termasuk belanja modal sebagai bagian dari belanja pembangunan;
3. Dengan melihat seberapa besar optimalisasi nilai belanja publik mengakibatkan kegiatan-kegiatan ekonomi ikutan yang bermanfaat bagi masyarakat sehingga menambah kesejahteraan masyarakat juga masih rendah efektivitasnya. Belanja anggaran pembangunan hanya mampu mewujudkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi eksklusif dan belum berkualitas.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan fokus pemerintah untuk melakukan pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota kupang belum terlaksana secara maksimal dan terkesan belum berpihak pada masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan alokasi dana belanja daerah yang masih memprioritaskan belanja aparatur jika dibandingkan dengan alokasi dana untuk belanja Publik dengan selisih alokasi belanja

sebesar 87.21%. Disarankan kepada pemerintah Kota Kupang agar kedepan dapat meningkatkan alokasi belanja public minimal sebanding dengan alokasi belanja aparatur sehingga percepatan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat kota dapat tercapai.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ayuningsasi 2004, *Analisis perimbangan dan pertumbuhan belanja daerah Propinsi Bali tahun 1998 sampai tahun 2002*
- Bastian, Indra, 2001. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, BPFE, Yogyakarta.
- Halim Abdul, 2004. *Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah*, Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah, UUP AMP YKPN, Yogyakarta
- Hariadi Pramono; 2010; *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Balai Penerbit Salemba Empat Jakarta
- Hirawan Susiyati B., 1991, "*Pembiayaan Pembangunan Daerah*", Dalam Arsyad Anwar (Editor), *Prospek Ekonomi Jangka Pendek dan Sumber Pembiayaan Pembangunan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Mahmudi, 2007, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Panduan Bagi Eksekutif, DPRD dan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial dan Politik*, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta
- Mahsun Mohamad, 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Balai Penerbit Fakultas Ekonomi UGM Yogyakarta
- Mardiasmo, 2002. *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi II, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi, Yogyakarta.
- Mulyana Budi 2010, *Perencanaan dan Penganggaran Daerah*. Kementerian keuangan republik Indonesia Badan pendidikan dan pelatihan keuangan Jakarta
- Peraturan Pemerintah Nomor 105, Tahun 2000 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 41, Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 2006. Depdagri RI.
- Prabowo Nurlan, 1999; *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Jakarta, Penerbit PT Indeks,
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Sidharta, Ananta Eka, 2008. *Analisis Kinerja Keuangan Pemda dengan Pendekatan Analisis Rasio Keuangan pada APBD di Kota Malang*. Jurnal Penelitian Uनेversitas Negri Malang. Tahun 20 Nomor 2.
- Undang-undang Nomor 25, Tahun 1999 tentang Undang-undang Nomor 33, Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, 2004. Depdagri RI.
- Usman, Nurzaman, 1998, *Otonomi dan Implikasinya Terhadap Kemampuan Keuangan Daerah*, Jurnal Ekonomi dan Manajemen, Volume IV No.1 dan 2, Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, Padang.